

MONITORING RENCANA AKSI DINAS SOSIAL TAHUN 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2026
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	69%

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKSI KEGIATAN	TARGET				KELUARAN	DANA (Rp)	REALISASI TW I	FAKTOR PENDORONG	RAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI PEMECAHAN					
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4											
1	Program Pemberdayaan Sosial																		
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota													170.000.000				
				Sosialisasi PUB dan UGB Kepada masyarakat (Perorangan atau lembaga); Pemberian Ijin PUB; menjadi Saksi UGB; Monitoring PUB dengan meminta pertanggungjawaban penyelenggara PUB; Koordinasi pemberian ijin PUB dan pelaksanaan saksi UGB dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	15%	30%	30%	25%	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	0	0	Adanya SDM pilar-pilar sosial sebagai motor penggerak di lapangan	Masih adanya pemohon izin PUB yang belum membuat laporan kegiatan PUB	Pemberian reminder dan sanksi kepada pemohon PUB yang belum membuat laporan					
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													170.000.000	0			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Pembinaan kepada PSM, TKSK, dan relawan sosial lain baik berupa koordinasi personal melalui sms/chat/telepon/email maupun melalui rapat-rapat koordinasi - Koordinasi pembinaan PSKS perseorangan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah - Fasilitasi PSKS Perseorangan mengikuti kegiatan didalam maupun di luar wilayah Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah) - verifikasi dan pendataan ulang PSKS perseorangan yang aktif - Monitoring kegiatan PSKS Perseorangan PSM, TKSK melalui pelaporan kinerja bulanan (TKSK) dan semesteran (PSM)	15%	30%	30%	25%	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	10,000,000	10	Adanya rasa kepedulian yang tinggi dari PSKS untuk memberikan pelayanan kepada PPKS	Tidak semua PPKS aktif melakukan kegiatan	Memberikan motivasi serta peningkatan kapasitas kepada PPKS Perseorangan serta mendata ulang PPKS yang masih aktif melaksanakan kegiatan					
		Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota		Sosialisasi, pembinaan puskesmas desa dan pengembangan /pembentukan puskesmas desa	15%	30%	30%	25%	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	5.000,000	15	Adanya SDM pendamping sosial untuk mensosialisasikan Puskesmas di desa dan kelurahan	Hampir seluruh desa atau kelurahan sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi masih belum ada SK Puskesmas	Memberikan sosialisasi dan motivasi dalam pembentukan Puskesmas					
		Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial		Pemberian layanan kesejahteraan sosial melalui SLRT	25%	25%	25%	25%	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	5.000,000	15	Jumlah SDM SLRT yang memadai	Terbatasnya ruang pelayanan SLRT apabila terjadi penumpukan antrean klien	Mensosialisasikan pelayanan di MPP agar antrean tidak menumpuk di satu tempat					
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Peningkatan sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan cara Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15%	30%	30%	25%	Jumlah sertifikat yang dihasilkan dari peningkatan sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0	0	Fungsi LK3 masih berjalan melalui peran pendamping sosial di lapangan	Kegiatan LK3 belum terorganisir karena belum ada SDM LK3 yang memenuhi persyaratan yang mengakibatkan tertundanya proses SK LK3	Percepatan pembentukan kelembagaan LK3, serta memperluas jejaring dengan tenaga profesional yang dibutuhkan LK3					

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.	15%	30%	30%	25%	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	15	Adanya PSKS Kelembagaan yang aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Kurangnya SDM kesejahteraan sosial di setiap LKS serta masih ada sarana dan prasarana yang kurang memadai	Peningkatan peran pemerintah dalam pendampingan lembaga sosial, serta pembinaan dan diklat untuk SDM Kesejahteraan Sosial
			Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan perseorangan / kelompok. Pengiriman diklat, rapat maupun pertemuan baik luring maupun daring ke pusat maupun provinsi.	15%	30%	30%	25%	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	0	0	tersedianya bimbingan teknis dan diklat baik dari pusat, provinsi, maupun lembaga lainnya	kurangnya informasi tentang diklat dan bimtek kepada SDM Kesejahteraan sosial	Meningkatkan koordinasi serta jejaring dengan penyelenggara bimbingan teknis dan diklat bagi SDM Kesejahteraan Sosial
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN													
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemberian bantuan sosial (Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dengan target 5 orang)	25%	25%	25%	25%	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota		2	adanya dukungan dari pendamping sosial dan keluarga klien untuk memulai usaha atau beradaptasi kembali dengan lingkungan asal	keterbatasan modal, rendahnya kepercayaan diri klien, kurangnya pendampingan	memberikan bantuan modal, memberikan pendampingan agar klien memiliki kepercayaan diri dan kemampuan pengelolaan bantuan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									611,500,000				
			Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan berupa beras sebanyak 75 Kg untuk 3 PPKS berdasarkan hasil asesmen	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2,000,000	4	adanya ketersediaan anggaran dan peran pendamping sosial	terbatasnya kuota yang disediakan	berkoordinasi dengan sistem sumber yang lain
			Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang yaitu penyediaan kaos lengan panjang dan pakaian lainnya dengan target 34 orang	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	4	adanya ketersediaan anggaran dan peran pendamping sosial	terbatasnya kuota yang disediakan	berkoordinasi dengan sistem sumber yang lain
			Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Layanan Alat Bantu berupa kursi roda dengan target 5 orang	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35,000,000	4	adanya ketersediaan anggaran dan peran pendamping sosial	terbatasnya kuota yang disediakan	berkoordinasi dengan sistem sumber yang lain

			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga berupa kegiatan penyatuan kembali pihak-pihak yang sebelumnya terpisah. Baik itu wilayah, keluarga, organisasi, atau kelompok sosial	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	14	Adanya jejaring pekerja sosial di daerah lain (antar kabupaten/provinsi), pemanfaatan media sosial, dan sistem database kependudukan	keluarga klien enggan menerima kembali anggota keluarganya	melaksanakan sosialisasi kepada keluarga dan/atau berkoordinasi dengan panti pelayanan sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25%	25%	25%	25%	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	5	kerjasama dengan sentra terpadu kartini untuk menyediakan rumah terapi di dinas sosial	ketimpangan antara jumlah klien dengan terapis	membuat jadwal agar dapat menjangkau klien secara merata
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan membantu mengakses sistem sumber data yang dibutuhkan	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	5	adanya dukungan program desa permata	kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan	melaksanakan pendampingan terutama bagi penyandang disabilitas
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi PPKS untuk mengakses layanan pendidikan formal atau non formal	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2,500,000	10	tersedianya layanan dari Panti Sosial milik Dinas Sosial Provinsi kepada PPKS sesuai dengan kebutuhannya	sistem antrian dan kuota dari penyedia layanan	memberikan sosialisasi dengan baik kepada PPKS terkait sistem layanan yang disediakan oleh Sentra Terpadu Kartini dan Panti Sosial
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	penyediaan saluran pengaduan yang mudah dijangkau (online/offline) melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu, standarisasi prosedur penanganan, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan data untuk perbaikan kebijakan (seperti DT-SEN)	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	8,000,000	5	ketersediaan SDM Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dalam merespon aduan serta dukungan aplikasi SIKS NG	adanya aduan dan data yang membutuhkan layanan lintas sektor	melakukan koordinasi lintas sektor dan mengupayakan adanya pemutakhiran data secara berkala
			Pemberian Layanan Kedaruratan	pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial dengan bantuan sosial (kesehatan dan pendidikan) maksimal yang diberikan adalah Rp 6.000.0000/ orang	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	504,000,000	6	kerjasama antara Dinas Sosial dengan RSU, RSK Ngesti Waluyo, dan RS PKU Muhammadiyah	data yang didapatkan kurang lengkap	melakukan koordinasi dan asesmen
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga berfokus pada upaya pengumpulan data PPKS jika memungkinkan atau sumber lain mengenai identitas diri, alamat asal dan kontak keluarga; koordinasi data dengan capil; berkoordinasi dengan pihak lain dalam mencari informasi.	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	5	Adanya jejaring pekerja sosial di daerah lain (antar kabupaten/provinsi), pemanfaatan media sosial, dan sistem database kependudukan	klien menolak memberikan informasi dan tidak tercatat dalam data kependudukan	berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat
			Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan kepada PPKS	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	10	tersedianya layanan dari sentra terpadu kartini dan Panti Sosial milik Dinas Sosial Provinsi kepada PPKS sesuai dengan kebutuhannya	sistem antrian dan kuota dari penyedia layanan	memberikan sosialisasi dengan baik kepada PPKS terkait sistem layanan yang disediakan oleh Sentra Terpadu Kartini dan Panti Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat (Berupa Layanan Kebutuhan dasar, penelusuran identitas dan keluarga, rujukan ke Faskes dan panti sosial, layanan reunifikasi)	25%	25%	25%	25%	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	7	Kerjasama antara SDM UPTD rumah singgah dan kerjasama dengan instansi terkait semakin kuat sehingga penanganan PPKS cepat tertangani	Kendaraan operasional mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan keluar kota dalam rangka pendampingan PPKS	Peminjaman kendaraan operasional di bidang lain dan di sekertariat
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4.591.448.597				

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan perlengkapan surat menyurat seperti alat tulis kantor, amplop, kertas HVS Polio, HVS A4 Kwarto	25%	25%	25%	25%	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	5.700,000	17	Kebutuhan administrasi harian, kelancaran proses korespondensi, dan tersedianya alat tulis serta kertas untuk mendukung efisiensi kerja kantor	Kebutuhan operasional yang tinggi dengan ketersediaan barang yang tidak banyak	Memaksimalkan ketersediaan stok pengadaan, dan pengelolaan dengan tepat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik, internet	25%	25%	25%	25%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.532,500	28	Kebutuhan kelancaran operasional kantor, menjaga konektivitas dan pasokan utilitas, serta memastikan layanan telekomunikasi, listrik, dan air tetap tersedia tanpa gangguan	Keterlambatan pembayaran, kenaikan tarif pemakaian dan gangguan teknis pada layanan	Melakukan perencanaan, membayar tagihan tepat waktu, memantau kenaikan tarif, dan memastikan layanan berjalan lancar	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor seperti jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan, keamanan, supir, auransi bagi non ASN, jaminan kecelakaan bagi Non ASN, jaminan kematian bagi non ASN, TKSK, Administrasi disabilitas)	25%	25%	25%	25%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	914.183,445	22	Kelancaran administrasi serta untuk memastikan layanan yang aman, nyaman, dan terpadu bagi seluruh pegawai dan pihak terkait	Keterlambatan pembayaran	Perencanaan anggaran, penjadwalan pembayaran tepat waktu, dan pengingat rutin	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan : Isi Ulang Refil, Tinta Printer Epson Original, Tinta Epson (003K, 664K), Mouse, Karangan Bunga, Jasa Petugas Kebersihan dari LH	25%	25%	25%	25%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.550,000	15	Kebutuhan operasional kantor, kelancaran administrasi, kenyamanan lingkungan kerja, serta mendukung kegiatan resmi dan pelayanan yang efektif	Stok terbatas harga barang yang naik, pemakaian tinggi	Perencanaan kebutuhan, pengadaan lebih awal, pemantauan stok, pengendalian penggunaan, dan pemilihan barang atau jasa berkualitas	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,350,381					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembelian Amplas, Kuas cat, Kuas, Cat Besi, Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas, Skrap, Pipa PVC AW O 4" (setara maspion), lem pipa, Benang, Paku, Jasa Tenaga Penanganan, Renovasi talang,	25%	25%	25%	25%	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53,350,381	4	Pemeliharaan dilakukan bukan hanya karena rusak, tetapi untuk mencegah terhambatnya kegiatan operasional kantor dan memperlancar kegiatan operasional	Cuaca menjadi kendala utama terutama untuk melaksanakan kegiatan	Perencanaan waktu yang tepat dengan menyesuaikan cuaca saat melaksanakan kegiatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian Oli Disel, Oli Mesin, Oli Transmisi manual/ gardan, Pertamina, Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Pembelian suku cadang seperti kopling, trimming belt, shock beker, ban luar, filter oil, kampas rem depan dan belakang, busi, filter udara, wiper depan, accu.	25%	25%	25%	25%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	142.500.000	17	Pemeliharaan kendaraan (servis rutin) untuk memperlancar operasional dan mobilitas dalam rangka melaksanakan kegiatan agar tetap nyaman, aman dan taat administrasi pembayaran pajak kendaraan	Ketersediaan suku cadang, tenaga teknis/mechanik dan penjadwalan pajak kendaraan yang banyak	Penanganan melalui prioritas perawatan, perencanaan anggaran yang efisien, pengelolaan stok dan kerja sama dengan penyedia suku cadang, serta peningkatan kualitas dan pengawasan tenaga teknis agar kendaraan tetap dalam kondisi optimal siap operasional dan penjadwalan yang tepat pembayaran pajak	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan														
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota di Taman Makam Pahlawan Bambang Soegeng dan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dengan Pembelian F Stand mic, Mic wireless, roundup/ herbisida, alat kebersihan; Honor Tenaga Kebersihan kebersihan untuk 4 orang 2 Lokasi @98.000 per hari	25%	25%	25%	25%	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	66,000,000	25	Kegiatan yang telah berjalan adalah pemeliharaan kebersihan dan fasilitas ziarah TMP			Item belanja operasi dan belanja modal lainnya akan dibelanjakan di bulan april
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial														
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							806,631,000					

			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	- Koordinasi dengan Pengurus Panti - Penyaluran Bantuan Permakanan bagi Anak Panti Asuhan - Pendampingan Sosial pembelanjaan bantuan	3%	87%	5%	5%	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	799,131,000	20	Adanya Pengurus Panti yang sudah mendampingi program permakanan secara berkelanjutan	Adanya perbedaan data anak panti antara di proposal dan di penetapan APBD	Dilakukan Verifikasi data anak panti
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	- Fasilitasi layanan Adopsi (Pangkatan Anak) - Koordinasi dengan Dindikcapil dalam hal Adminduk	25%	25%	25%	25%	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7,500,000	20	Adanya Pekerja Sosial Profesional dalam fasilitas Layanan Adopsi	SDM Sakti Peksos yg sebelumnya mengampu Adopsi, semua di mutasi ke Sekolah Rakyat, sehingga berpengaruh pada ketersediaan SDM	Koordinasi antara Peksos di Dinas dengan Sakti Peksos sebagai Pengampu Progrm layanan sebelumnya
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							9,757,478,728				
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Menyiapkan prelist data - Melakukan koordinasi dengan pendamping sosial terkait pemutakhiran data - Melaksanakan sosialisasi kepada pendamping sosial dan operator pengisi data desa/kelurahan terkait pembaruan dan pengusulan data - Melakukan cleansing data hasil verval - Membuat draft SK penetapan DKD terbaru		50%		50%	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	35,001,738	25	Keberadaan TKSK dan Pendamping PKH berdampak positif terhadap berbagai kegiatan pemutakhiran data.	Kekosongan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menjadi tumpuan koordinasi antara Dinas Sosial dengan Desa/Kelurahan.	Optimalisasi tugas dan fungsi Pendamping Sosial di setiap Pokja, TKSK dan Pendamping Program PKH melebur menjadi 1, menjadi Pendamping Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- melaksanakan sosialisasi aplikasi - melaksanakan bimtek pemutakhiran dan pengusulan data - melaksanakan pengesahan usulan data - melaksanakan koordinasi dengan pendamping sosial dan pengisi data desa/kelurahan	25%	25%	25%	25%	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5,000,000	25	Peran serta pendamping sosial dalam proses pemutakhiran data	Kekosongan Petugas pemutakhiran data	Melaksanakan monitoring petugas pemutakhiran data desa/kelurahan
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Bantuan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yg rawat inap/kegawatdaruratan di Faskes kelas 3 jumlah 2.292 org - Bantuan iuran BPJS TK (segmen pekerja rentan, buruh tani tembakau, ketua RT/RW, dan pengajar keagamaan) jumlah 19.985 org - fasilitasi bantuan Kartu Jateng Ngopeni (KAJEN) jumlah 140 org - fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) jumlah 34.077 org.	25%	25%	25%	25%	Jumlah orang yang mendapat bantuan sosial kesejahteraan keluarga	9,014,976,990	10	SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan verval data penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait.	Perbup Bantuan Perlindungan Kesehatan masih dalam proses harmonisasi.	Menunggu ditetapkannya Perbup Bantuan Perlindungan Kesehatan.
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Melakukan Koordinasi dengan Pendamping UEP - Melakukan verifikasi calon penerima bantuan - Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Individu dan Kelompok	3%	87%	5%	5%	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	702,500,000	15	Adanya SDM Pendamping UEP KUBE yang sudah mendampingi pemberdayaan di KPM dampingan	Jadwal verval UEP KUBE bersamaan dengan Ground Cek PBI Tahap II	Re-schedule dan menyesuaikan jadwal masing-masing pendamping di kecamatan
7	PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							67,000,000.00				
			Penyediaan Makanan	Pemberian paket bantuan permakanan bagi korban bencana. Bantuan sandang untuk korban bencana menyesuaikan dengan kebutuhan korban bencana	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	22,500,000	30	Bantuan paket makanan dari berbagai elemen seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan PSKBA Kementerian Sosial oleh Sentra Terpadu Kartini Temanggung	Kurangnya bantuan permakanan bagi korban bencana	Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung stok bantuan permakanan bagi korban bencana
			Penyediaan Sandang	Pemberian paket bantuan sandang bagi korban bencana. Bantuan sandang untuk korban bencana menyesuaikan dengan kebutuhan korban bencana	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000	20	Bantuan paket makanan dari berbagai elemen seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan PSKBA Kementerian Sosial oleh Sentra Terpadu Kartini Temanggung	Kurangnya bantuan sandang untuk kelompok rentan bagi korban bencana	Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung stok bantuan sandang bagi korban bencana

			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi pemertu layanan	25%	25%	25%	25%	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000	30	Dukungan berupa bantuan tenda untuk pengungsian dan PSKBA Kementerian Sosial	Fasilitas pengungsian terhalang karena medan bencana yang sulit ditempuh	Bekerja sama dengan BPBC untuk menjangkau lokasi bencana yang sulit dijangkau guna memfasilitasi pengungsian korban bencana
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penyediaan bantuan untuk kelompok rentan korban bencana	25%	25%	25%	25%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500.000	30	Bantuan pemakanan untuk kelompok rentan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya bantuan pemakanan untuk kelompok rentan bagi korban bencana	Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung stok bantuan pemakanan kelompok rentan bagi korban bencana
			Pelayanan dukungan Psikososial	Pelayanan dukungan Psikososial bagi pemertu layanan.	25%	25%	25%	25%	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000	30	Pekerja sosial membantu relawan untuk melakukan pemberian layanan dukungan psikososial untuk korban bencana	Relawan belum sepenuhnya memiliki keterampilan untuk melakukan pemberian layanan dukungan psikososial	Peningkatan kapasitas relawan untuk melakukan pelayanan dukungan psikososial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								40.000.000				
			Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25%	25%	25%	25%	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	40.000.000	30	Loyalitas relawan taruna siaga bencana yang siap siaga bergantian piket di posko untuk menanggulangi penanggulangan bencana	Beberapa wilayah belum memiliki relawan sehingga penanganan bencana sedikit tertambat	Perekrutan relawan taruna siaga bencana untuk wilayah rawan bencana


 Temanggung, April 2025
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Temanggung
 UMI LESTARI NURJAHAN, S.Sos., M.Si
 Pemula Ulama Muda IV c